



20  
23

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
JL. PEMUDA KM 2 REMBANG  
Telp./Fax.( 0295 ) 692311**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes,

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/27/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199303 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Kedudukan,Tugas Pokok & Fungsi.....	2
1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat daerah.....	3
1.3.2 Kondisi Pegawai .....	4
1.3.3 Data Sarana dan Prasarana .....	5
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	7
1.5 Landasan Hukum.....	13
1.6 Sistematika .....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18
2.1 Rencana Strategis .....	24
2.1.1 Visi .....	25
2.1.2 Misi.....	26
2.1.3 Tujuan.....	27

2.1.4	sasaran .....	27
2.1.5	Strategi.....	27
2.1.6	Kebijakan.....	28
2.2	Perencanaan Kinerja.....	30
2.3	Perjanjian Kinerja.....	32
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>39</b>
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	39
3.2	Analisis Capaian Kinerja.....	58
3.3	Realisasi Anggaran.....	71
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
4.1	Kesimpulan.....	74
4.2	Rekomendasi .....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang.....	5
Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang.....	6
Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2016-2023.....	11
Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2023 .....	12
Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa .....	13
Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2023.....	19
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2023 .....	19
Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023 .....	20
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	29
Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2023.....	31
Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	31
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	33
Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023.....	34
Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	39
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023 .....	40
Tabel III. 3 Rekap Status Desa Berdasarkan data IDM Tahun 2023.....	42
Tabel III. 4 Penetapan Skor Kinerja Desa .....	44
Tabel III. 5 Kriteria Skor desa .....	44
Tabel III. 6 IKM Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023 .....	47
Tabel III. 7 Data BUMDESMA Kawasan Tahun 2023.....	48
Tabel III. 8 Data BUMDESMA Lainnya Tahun 2023 .....	50
Tabel III. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan .....	56

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	58
Tabel III. 11 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	60
Tabel III. 12 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2023 .....	61
Tabel III. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	62
Tabel III. 14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
Tabel III. 15 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2023 .....	66
Tabel III. 16 Capaian Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026 .....	69
Tabel III. 17 Capaian Kinerja dengan Target Renstra Kementerian PDPT 2019-2024 .	70
Tabel III. 18 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang* .....4

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perspektif yang luas Laporan Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini secara garis besar berisi tentang informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023.

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2023 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun kelima dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang periode Tahun 2022-2026.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu dari pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinpermades Kabupaten Rembang dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

### **1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

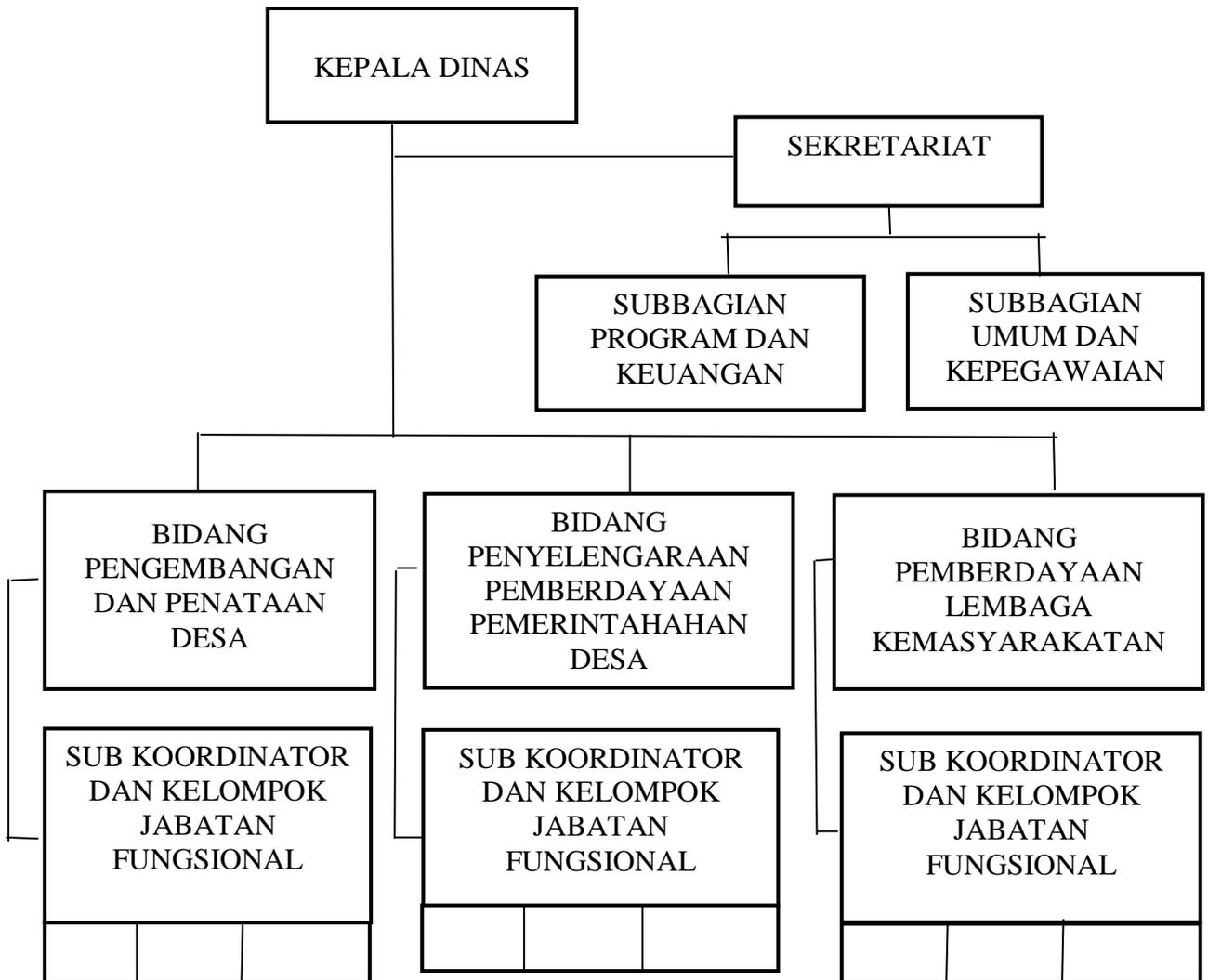
### **1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa
4. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

**Gambar I. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang**



*Sumber Data : Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021*

### 1.3.2 Kondisi Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompentensi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang didukung oleh 52 pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 27 orang, 25 PPPK, Tenaga Kontrak 1 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 18 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 27 orang dengan rincian

sebagai berikut:

**Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN									JML
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	SD	SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tningkat I (I/d)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur ( II/c)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
3	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	2	-	-	-	3	-	-	5
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
4	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	2	6	0	0	-	11	8	0	27

Sumber Data : Dinpermades 2023

### 1.3.3 Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

**Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang**

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	Bidang	
2	Gedung	10	Gedung	- Gedung permanen : 7 - Gudang tertutup : 2 - Gedung pertemuan : 1
3	Alat Besar	1	Buah	Portable Generating Set
4	Alat angkutan Darat Bermotor	18	Buah	- Station Wagon : 5 - Kendaraan dinas bermotor perorangan : 1 - Sepeda Motor : 19
5	Alat Kantor	21	Buah	- Alat penyimpan perlengkapan kantor : 19 - Alat kantor lainnya: 2
6	Alat Rumah tangga	440	Buah	- Meubelair : 393 - Alat pembersih : 2 - Alat Pendingin : 24 - Alat rumah tangga lainnya (Home Use):21
7	Alat Pemadam kebakaran	1	Buah	
8	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17	Buah	- Kursi Putar : 3 - Meja/kursi kerja/rapat Pejabat :14
9	Lemari arsip	4	Buah	
10	Alat Studio	31	Buah	- Peralatan studio audio: 9 - Peralatan studio video dan film : 19 - Alat studio lainnya : 3

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
11	Alat Komunikasi Telephone	2	Buah	
12	Peralatan pemancar/parabola	1	Buah	
13	Komputer unit	57	Buah	- PC Unit : 6 - Laptop : 49 - Personal komputer lainnya : 2
14	Peralatan Komputer/hard disk	2	Buah	
15	Peralatan personal komputer	40	Buah	- Printer : 40 - External Harddisk : 5
16	Peralatan jaringan	2	Buah	- Server : 1 - Modem : 1
17	Jaringan listrik	2	Buah	
18	Sumur resapan	1	buah	

Sumber Data : Dinpermades 2023

#### 1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis isu strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli desa terhadap pendapatan desa
2. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin, kelompok rentan, perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa

➤ **INDEKS DESA MEMBANGUN**

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan

## Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

a. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

d. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

 Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan

bencana, Tanggap bencana

- c. Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2017-2023**

Indeks Desa Membangun	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,605	0,636	0,634	0,677	0,689	0,706	0,725

Sumber data: Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,725% naik 0,019% dibanding Tahun sebelumnya, hal

tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

**Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2022**

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber	2	3	13	-	-
2	Bulu		7	9	-	-
3	Gunem	3	13	-	-	-
4	Sale		5	10	-	-
5	Sarang	1	7	15	-	-
6	Sedan	1	9	11	-	-
7	Pamotan	1	6	16	-	-
8	Sulang	1	14	6	-	-
9	Kaliori	1	12	10	-	-
10	Rembang	9	18	-	-	-
11	Pancur	-	8	15	-	-
12	Kragan	-	9	18	-	-
13	Sluke	-	6	8	-	-
14	Lasem	3	15	2	-	-
	Jumlah	22	132	133		

Sumber data: Dinpermades 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 14 Kecamatan dan 287 desa di Kabupaten Rembang, terdapat 22 desa di 9 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, 132 desa di 14 Kecamatan dengan status Desa Maju dan status Desa Berkembang yaitu sejumlah 133 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Rembang.

**Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2022 dan 2023**

No	Status	Tahun 2022	%	Tahun 2023	%	Keterangan
1	<b>Mandiri</b>	14	4.88%	22	7.66%	Naik
2	<b>Maju</b>	99	34.49%	132	45.99%	Naik
3	<b>Berkembang</b>	174	60.63%	133	46.34%	Turun
4	<b>Tertinggal</b>	0	0.00%	0	0.00%	-
5	<b>Sangat Tertinggal</b>	0	0.00%	0	0.00%	-
	<b>Jumlah</b>	<b>287</b>		<b>287</b>		

Sumber data: Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan status desa di tahun 2023. Status Desa Mandiri terjadi Kenaikan 2,78 % atau sejumlah 8 desa naik dari kriteria status Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Status Desa Maju terjadi Kenaikan sebesar 11,5 % atau naik sejumlah 33 desa dari kriteria status Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Sedangkan yang terjadi penurunan adalah Status Desa Berkembang, yang Turun sebesar 14,29 % atau 41 desa karena perubahan status menjadi Desa Maju. Dan sejak tahun 2021 sudah tidak terdapat desa Tertinggal maupun Desa Sangat

Tertinggal.

### **1.5 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **1.6 Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab, sebagai berikut :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja organisasi, kondisi pegawai, data sarana prasarana, pembiayaan, dan sistematika penyusunan.

### **BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yang kemudian dari Renstra tersebut akan diturunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disyahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya.

### BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right]$$

$$\text{Rumus efektivitas} = \left[ \frac{\text{Capaian Kinerja} \times 100 \%}{\text{Target Kinerja}} \right]$$

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB. IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten. RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**. **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menjadi penopang utama dalam mencapai Misi IV : “Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Dinpermades termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten Rembang yakni “Terwujudnya Kemandirian Desa”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Desa Berstatus maju dan mandiri” dengan indikator “Persentase desa Maju dan Mandiri”.

Adapun indikator kinerja utama dan target yang hendak dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	32,8%

Sedangkan indikator sasaran yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1,3 %
	Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	55

Guna mencapai sasaran tersebut di atas dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah menetapkan 5

program, 9 kegiatan, dan 43 sub kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023**

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai SAKIP OPD Dinpermades	72	<b>4.040.479.259</b>
		Nilai IKM OPD Dinpermades	82	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	80%	15.750.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	9.500.000
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.250.000
c	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	4.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80 %	2.925.930.000
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 org	2.866.930.000
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1dok	59.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100 %	168.870.500
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1paket	3.000.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.000.000
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40.300.500
d	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.500.000
e	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	3.600.000
f	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	10.500.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	92.970.000
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>619.295.800</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1.000.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	54.600.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 lap	21.057.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	542.638.800
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>% BMD dengan kondisi Baik</b>	<b>85%</b>	<b>310.632.959</b>
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	49.422.959
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	11.210.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	200.000.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	50.000.000
<b>B</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa</b>	<b>2 %</b>	<b>30.000.000</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa sesuai standart	2 %	30.000.000
a	Fasilitas tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	14 desa	10.000.000
b	Fasilitas penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	14 desa	20.000.000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADES</b>	<b>55 %</b>	<b>1.879.675.000</b>
1	Fasilitas Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang % Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	50 % 57 %	<b>1.879.675.000</b>
a	Fasilitas kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 dok	25.000.000
b	Fasilitas kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 dok	1.230.675.000
c	Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dok	624.000.000
<b>D</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan desa</b>	<b>% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas</b> <b>Rata-rata IKM Desa</b> <b>% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa</b>	<b>47 %</b> <b>71</b> <b>17 %</b>	<b>3.503.426.000</b>
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	% Anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS % Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	51 % 47 %	3.503.426.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
		% Pemerintah Desa dengan penatausahaan aset baik	56 %	
		% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	3,4 %	
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	166 dok	7.500.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	287 dok	5.000.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	287 dok	67.000.000
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	114 dok	2.835.426.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 orang	250.000.000
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	287 dok	140.000.000
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	295 lap	150.000.000
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	72 lap	20.000.000
i	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	172 dok	0
j	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	166 dok	28.500.000
k	Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	287 orang	0
l	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	287 lap	0
<b>E</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif</b>	<b>61 %</b>	<b>541.329.000</b>

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% Lembaga Ekonomi Desa Aktif  % Lembaga sosial dan budaya aktif  % Posyantekdes aktif	25 %  89.2 %  73 %	<b>541.329.000</b>
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya`	328 lembaga	40.000.000
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dok	92.801.000
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 lap	6.743.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lap	5.705.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 dok	396.080.000

## 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Renstra tersebut tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi

yang rasional. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, yaitu sebagai berikut :

### 2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat

mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Yang menjadi Visi Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 adalah :

*Mewujudkan “REMBANG GEMILANG 2026”.*

### 2.1.2 Misi

Misi adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan, sebagai suatu upaya untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan tata kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Urusan yang menjadi core business yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun urusan tersebut mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keempat yaitu : *Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal* dengan tujuan *Terwujudnya Kemandirian Desa* serta sasaran daerah *meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri.*

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2022 adalah : ***“Meningkatnya Desa berstatus maju dan mandiri.”***

Dengan indikator tujuan : *Persentase Desa Maju dan Mandiri.*

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan adalah :

***“Meningkatnya Kemandirian Desa”*** Dengan indikator sasaran : *% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa dan Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa.*

### 2.1.5 Strategi

Strategi Berdasarkan analisis isu-isu strategi maka dirumuskan beberapa strategi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Strategi sesuai dengan Misi IV: ***Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal*** yaitu:

1. Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa;
3. Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa;
4. Pendampingan pengelolaan aset;
5. Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantek;

6. Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan;
7. Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa;
8. Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;
11. Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
12. Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes;
13. Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes;
14. Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.

#### **2.1.6 Kebijakan**

Kebijakan merupakan arah yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan menjadi sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2023 antara lain sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya Perdes kewenangan desa;
- 2) Supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa;
- 3) Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi;
- 4) Bimbingan Teknis, monitoring, evaluasi pengelolaan aset;

- 5) Peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan penerapan pemanfaatan TTG
- 6) Bimbingan Teknis, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- 7) Peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa;
- 8) Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan;
- 9) Bimbingan teknis, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa;
- 10) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;
- 11) Pelatihan/ Bimbingan teknis dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang Perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdesa;
- 12) Pelatihan / Bimbingan teknis bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku;
- 13) Pelatihan/ Bimbingan teknis PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi.
- 14) Bimbingan Teknis, Workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa.

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		1) Persentase Desa Maju dan Mandiri	19,9	28,6	30,7	32,8	34,8
		Meningkatnya	2) % Kontribusi PADes terhadap	1	na	1,2	1,3	1,4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Kemandirian Desa	Pendapatan Desa					
			3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	na	na	54	55	55,5
			4) Nilai Sakip OPD	66.93	na	70	72	75
			5) IKM	76,74	na	80	82	84
			6) % Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	Na	1,7	2	2,4
			7) Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	14	27	41	55	68
			8) Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	Na	Na	46,3	47	49
			9) Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	Na	Na	16	17	19
			10) Rata-Rata IKM desa	Na	Na	70	71	72
			11) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	55	56	58	61	64

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan : Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Indikator Kinerja Utama : Persentase Desa Maju dan Mandiri	32,8
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	1) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1,3
	2) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	55

**Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	32,8
		Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,3
			Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	55
			Nilai Sakip OPD	angka	72
			IKM	angka	82

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	2
			Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADES	%	55
			Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	%	47
			Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	%	17
			Rata-Rata IKM desa	angka	71
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	61

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026. Adapun rincian perjanjian kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2023**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan : Meningkatkan Desa Berstatus Maju dan Mandiri	1) Persentase Desa maju dan Mandiri	%	32,8

2	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	2) % Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,3
		3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	55

Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Nilai SAKIP OPD Dinpermades	72	<b>4.040.479.259</b>
		Nilai IKM OPD Dinpermades	82	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% Keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	80%	15.750.000
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	9.500.000
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.250.000
c	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	4.000.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80 %	2.925.930.000
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 org	2.866.930.000
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	59.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100 %	168.870.500

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.000.000
c	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40.300.500
d	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.500.000
e	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	3.600.000
f	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	10.500.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	92.970.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	100 %	619.295.800
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1.000.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	54.600.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 lap	21.057.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	542.638.800
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	% BMD dengan kondisi Baik	85%	310.632.959
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	49.422.959

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	11.210.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	200.000.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	50.000.000
<b>B</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa</b>	<b>2 %</b>	<b>30.000.000</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa sesuai standart	2 %	30.000.000
a	Fasilitas tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	14 desa	10.000.000
b	Fasilitas penataan kewenangan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	14 desa	20.000.000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes</b>	<b>55 %</b>	<b>1.879.675.000</b>
1	Fasilitas Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang % Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	50 % 57 %	<b>1.879.675.000</b>
a	Fasilitas kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	12 dok	25.000.000
b	Fasilitas kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 dok	1.230.675.000
c	Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dok	624.000.000
<b>D</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan desa</b>	<b>% Pemerintah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas</b> <b>Rata-rata IKM Desa</b> <b>% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola</b>	<b>47 %</b> <b>71</b> <b>17 %</b>	<b>3.503.426.000</b>

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
		pemerintah desa		
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	% Anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS % Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas % Pemerintah Desa dengan penatausahaan aset baik % pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	51 % 47 % 56 % 3,4 %	3.503.426.000
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	166 dok	7.500.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	287 dok	5.000.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	287 dok	67.000.000
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	114 dok	2.835.426.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 orang	250.000.000
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	287 dok	140.000.000
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	295 lap	150.000.000
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	72 lap	20.000.000
i	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	172 dok	0
j	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	166 dok	28.500.000
k	Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	287 orang	0

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
1	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	287 lap	0
<b>E</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif</b>	<b>61 %</b>	<b>541.329.000</b>
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% Lembaga Ekonomi Desa Aktif  % Lembaga sosial dan budaya aktif  % Posyantekdes aktif	25 %  89.2 %  73 %	<b>541.329.000</b>
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya`	328 lembaga	40.000.000
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dok	92.801.000
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 lap	6.743.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 lap	5.705.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 dok	396.080.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja SKPD. Pengukuran Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Sangat baik
2	85,00 % - 100%	Baik
3	65% - 84,99%	Cukup
4	50% - 64,99%	kurang
5	< 50,00 %	Sangat Kurang

Hingga akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya, yaitu :

1. Tujuannya yaitu : Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri
2. Sasaran strategis yaitu : Meningkatnya kemandirian desa.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ditegaskan pula dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada saat penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2023	2022	2021	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase desa maju dan mandiri	32,8	53,6%	53,6%	39,3%	0,67%	0,68%	163,41 %
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADEs terhadap pendapatan desa	1,3	1,6	1,6	1,57	na	1,6	123,08 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2023	2022	2021	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	55	49	49	59	na	56,5	89,09 %
		Nilai Sakip OPD	72	70,11	70,11	67,17	66,92	76	97,38 %
		IKM	82	80,5	80,5	80	na	87	98,17 %
		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2	0	0	0	na	3	0
		Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55	80	80	57	27	100	145,45 %
		Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan Keuangan desa berkualitas	47	66	66	51	na	56	140,43 %
		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	17	11,6	11,6	0	na	26	68,24%
		Rata-Rata IKM desa	71	80,32	80,32	0	na	74	113,13%
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	61	48,4	48,4	47	56	69	79,34 %

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2023 atas 11 (sebelas) indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas dapat disimpulkan bahwa 5 indikator telah memenuhi target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan 6 indikator belum memenuhi target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan status atas capaian IKD sampai dengan akhir tahun 2023 adalah **TERCAPAI** dengan nilai rata-rata OPD sebesar 119,41 %.

### **Persentase Desa Maju dan Mandiri**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Persentase Desa Maju dan Mandiri telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari target 32,8 % realisasi mencapai 53,6 % atau sebesar 163,41 %. Dasar Penghitungannya menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah desa Mandiri} + \text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa Keseluruhan}} \times 100 \% = \frac{22 + 132}{287} \times 100\% = 53,6 \%$$

**Tabel III. 3 Rekap Status Desa Berdasarkan data IDM Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber	18	2	3	13	0	0
2	Bulu	16		7	9	0	0
3	Gunem	16	3	13	-	0	0
4	Sale	15		5	10	0	0
5	Sarang	23	1	7	15	0	0
6	Sedan	21	1	9	11	0	0
7	Pamotan	23	1	6	16	0	0
8	Sulang	21	1	14	6	0	0

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
9	Kaliori	23	1	12	10	0	0
10	Rembang	27	9	18	-	0	0
11	Pancur	23	-	8	15	0	0
12	Kragan	27	-	9	18	0	0
13	Sluke	14	-	6	8	0	0
14	Lasem	20	3	15	2	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>22</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Dinpermades 2023

### **Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa**

Realisasi Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,6% dari target sebesar 1,3%

Dasar penghitungan ini menggunakan formulasi ;

$$\left[ \frac{\text{Jumlah PADes se Kabupaten}}{\text{Jumlah Pendapatan desa}} \right] \times 100 \% = \frac{6.661.944.394}{413.324.260.244} \times 100 \% = 1,6 \%$$

### **Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa:**

Realisasi tahun 2023 sebesar 49 dari target sebesar 55 dengan tingkat capaian sebesar 89,09% Dasar Penghitungan ini menggunakan formulasi :

$$\left[ \frac{\text{Jumlah skor kinerja desa}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \right] \times 100 \%$$

Dasar penghitungan untuk mengetahui nilai skor kinerja desa dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{LRA belanja}}{\text{Total APBDes tahun 2022}} \right] \times 100\% = \frac{390.571.812.104}{442.425.376.156} \times 100 \% = 88\%$$

Dan untuk mengetahui skor kinerja desa dan kriteria skor desa dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 4 Penetapan Skor Kinerja Desa**

SKOR	PERSENTASE	SKOR	PERSENTASE	SKOR	PERSENTASE
61	100	40	79	19	58
60	99	39	78	18	57
59	98	38	77	17	56
58	97	37	76	16	55
57	96	36	75	15	54
56	95	35	74	14	53
55	94	34	73	13	52
54	93	33	72	12	51
53	92	32	71	11	50
52	91	31	70	10	49
51	90	30	69	9	48
50	89	29	68	8	47
49	88	28	67	7	46
48	87	27	66	6	45
47	86	26	65	5	44
46	85	25	64	4	43
45	84	24	63	3	42
44	83	23	62	2	41
43	82	22	61	1	40
42	81	21	60	0	39
41	80	20	59		

**Tabel III. 5 Kriteria Skor desa**

Kriteria	Skor
Buruk	0-20
Cukup	21-40

Baik	41-61
------	-------

Berdasarkan tabel kriteria skor desa, Kinerja Pemerintah Desa masuk dalam kriteria **Baik**, dimana dalam penghitungannya memperoleh nilai persentase 88% dengan skor 49.

### **Nilai Sakip OPD**

Nilai sakip OPD Tahun 2023 memperoleh nilai 70,11 dari target yang telah ditetapkan sebesar 72 atau sekitar 97,38%. Formulasi untuk penghitungan Nilai Sakip OPD adalah sebagai berikut :

*Jumlah Nilai Komponen (Perencanaan Kinerja + pengukuran+Pelaporan Kinerja+ evaluasi internal + Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi) (Hasil Review Inspektorat Kabupaten )*

### **IKM**

Capaian Nilai IKM OPD Dinpermades Tahun 2023 sebesar 80,5 dari target yang telah ditetapkan yaitu 82 atau sebesar 98,17%.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dari hasil pengukuran IKM Dinpermades diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III. 6 IKM Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	Persyaratan Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Waktu Pelayanan	Beaya/Tarif Pelayanan	Produk /spesifikasi jenis pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan	Sarana Prasarana
IKM per unsur	3,17	3,22	3,10	3,55	3,16	3,16	3,19	2,95	3,51
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	C	B
IKM Unit Layanan	80,50 (B atau Baik)								

#### **% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa**

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 2, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan tahun 2023 belum ada anggaran untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Desa sebagai penopang indikator kinerjanya.

Dasar penghitungannya menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang mempunyai dokumen batas wilayah desa}}{\text{jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$$

Untuk selanjutnya Dinpermades akan melaksanakan koordinasi serta mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

#### **% Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang Berkontribusi**

**terhadap PADes**

Realisasi kinerja mencapai 80 % dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 55% dan capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 145,45%. Formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\left[ \frac{\text{Jml Bumdesma Kawasan dan Bumdesma lainnya yg Berkontribusi thdp PADes}}{\text{Jml Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya keseluruhan}} \right] \times 100\%$$

Jumlah keseluruhan Bumdesma Kawasan di Tahun 2023 sebanyak 5 Bumdesma kawasan. Sedangkan Bumdesma kawasan yang sudah berkembang dan berkontribusi terhadap PADes sebanyak 3 Bumdesma yaitu Bumdesma Sumber Alas Samudrawela, arga makmur dan Kapalas Simoturun.

Jumlah keseluruhan Bumdesma Lainnya sebanyak 5 Bumdesma. Dan yang sudah berkembang dan berkontribusi terhadap PADes sebanyak 4 Bumdesma yaitu Bumdesma Mitra desa Sejahtera, Bumdesma Sambung Tani Barokah, Bumdesma Sarang Anggegayuh Sesarengan, dan Bumdesma Bulu Lestari Makmur.

Sehingga dasar penghitungannya sebagai berikut :

$$\frac{3 + 5}{5 + 5} \times 100\% = \frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$$

**Tabel III. 7 Data BUMDESMA Kawasan Tahun 2023**

No	Nama Bumdesa Bersama Kawasan	Desa	kecamatan
<b>A</b>	<b>SUMBER ALAS SAMUDRAWELA</b>		
1		PASARBANGGI	REMBANG
2		TRITUNGGAL	REMBANG
3		PUNJULHARJO	REMBANG
4		GEDONGMULYO	LASEM
5		DASUN	LASEM
6		TASIKSONO	LASEM
<b>B</b>	<b>ARGA MAKMUR</b>		
1		WARUGUNUNG	PANCUR

No	Nama Bumdesa Bersama Kawasan	Desa	kecamatan
2		CRIWIK	PANCUR
3		BANYUURIP	PANCUR
4		JOHOGUNUNG	PANCUR
5		GOWAK	LASEM
6		KAJAR	LASEM
7		SENDANGCOYO	LASEM
<b>C</b>	<b>KAPALAS SIMOTURUN</b>		
1		LAMBANGAN WETAN	BULU
2		SUMBER MULYO	BULU
3		KARANGASEM	BULU
4		PASEDAN	BULU
<b>D</b>	<b>TERSANJUNG RO WATU</b>		
		TERJAN	KRAGAN
		SENDANG	KRAGAN
		TANJUNGSARI	KRAGAN
		WATU PECAH	KRAGAN
		WORO	KRAGAN
<b>E</b>	<b>LIAT TEMPAYAN</b>		
		PLAWANGAN	KRAGAN
		BALONGMULYO	KRAGAN
		TEGALMULYO	KRAGAN

Sumber Data : Dinpermades 2023

Tabel III. 8 Data BUMDESMA Lainnya Tahun 2023

No	Nama Bumdesa Bersama Lainnya	Desa	kecamatan
<b>A</b>	<b>MITRA DESA SEJAHTERA</b>		
1		PULO	REMBANG
2		SUKOHARJO	REMBANG
3		TRITUNGGAL	REMBANG
4		TASIKAGUNG	REMBANG
5		GEGUNUNGWETAN	REMBANG
6		JOLOTUNDO	LASEM
7		BABAGAN	LASEM
8		DOROKANDANG	LASEM
9		BINANGUN	LASEM
10		LERAN	SLUKE
11		PANGKALAN	SLUKE
12		KARANGHARJO	KRAGAN
13		PANDANGAN WETAN	KRAGAN
14		SUMBERAGUNG	PANCUR
<b>B</b>	<b>SAMBUNG TANI BAROKAH</b>		
1		KALIPANG	SARANG
2		DADAPMULYO	SARANG
		GONGGANG	SARANG
<b>C</b>	<b>SARANG ANGGEGAYUH SESARENGAN</b>		

No	Nama Bumdesa Bersama Lainnya	Desa	kecamatan
1		LODAN WETAN	SARANG
2		BONJOR	SARANG
3		TAWANGREJO	SARANG
4		SAMPUNG	SARANG
5		BATURNO	SARANG
6		BABAKTULUNG	SARANG
7		NGLOJO	SARANG
8		JAMBANGAN	SARANG
9		PELANG	SARANG
10		GILIS	SARANG
11		GUNUNG MULYO	SARANG
12		GONGGANG	SARANG
13		SUMBERMULYO	SARANG
14		KALIPANG	SARANG
15		DADAPMULYO	SARANG
16		SENDANGMULYO	SARANG
17		BANOWAN	SARANG
18		TEMPERAK	SARANG
19		KARANGMANGU	SARANG
20		BAJINGJOWO	SARANG
21		BAJINGMEDURO	SARANG
22		SARANGMEDURO	SARANG
<b>D</b>	<b>BULU LESTARI MAKMUR</b>		
1		BULU	BULU
2		CABEAN	BULU
3		JUKUNG	BULU
4		KADIWONO	BULU

No	Nama Bumdesa Bersama Lainnya	Desa	kecamatan
5		KARANGASEM	BULU
6		LAMBANGAN KULON	BULU
7		LAMBANGAN WETAN	BULU
8		MANTINGAN	BULU
9		MLATIREJO	BULU
10		NGULAAN	BULU
11		PASEDAN	BULU
12		PINGGAN	BULU
13		PONDOKREJO	BULU
14		SENDANGMULYO	BULU
15		SUMBERMULYO	BULU
16		WARUGUNUNG	BULU
<b>E</b>	<b>KALIORI LKD</b>		
1		METESEH	KALIORI
2		MAGUAN	KALIORI
3		SIDOMULYO	KALIORI
4		WIROTO	KALIORI
5		BANGGI	KALIORI
6		KUANGSAN	KALIORI
7		GUNUNGSARI	KALIORI
8		SENDANGAGUNG	KALIORI
9		KARANGSEKAR	KALIORI
10		BABADAN	KALIORI
11		PENGGOL	KALIORI
12		SAMBIYAN	KALIORI
13		MOJOREMBUN	KALIORI
14		TUNGGULSARI	KALIORI

No	Nama Bumdesa Bersama Lainnya	Desa	kecamatan
15		TAMBAKAGUNG	KALIORI
16		MOJOWARNO	KALIORI
17		DRESI KULON	KALIORI
18		DRESI WETAN	KALIORI
19		TASIKHARJO	KALIORI
20		PURWOREJO	KALIORI
21		BOGOHARJO	KALIORI
22		BANYUDONO	KALIORI
23		PANTIHARJO	KALIORI

Sumber Data : Dinpermades 2023

### **% Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Berkualitas**

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 66% dari target yang telah ditetapkan sebesar 47 % atau sebesar 140,43%. Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

*% desa yang menetapkan perdes APBDes tepat waktu + % Desa dengan progres pendapatan asli desanya (PADes)meningkat + % desa yang menetapkan Perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desanya dibagi 3*

Dasar penghitungannya sebagai berikut :

- % Desa yang menetapkan Perdes APBDes tepat waktu :

$$\frac{230}{287} \times 100\% = 80\%$$

287

- % Desa dengan progres PADes meningkat :

$$\frac{47}{251} \times 100\% = 18,5\%$$

251

Dari 251 jumlah keseluruhan Bumdes, sebanyak 47 Bumdes sudah berkontribusi terhadap PADes

- % Desa yang menetapkan Perdes Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa tepat waktu : 100 %

Sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{80\% + 18,5\% + 100\%}{3} = \frac{198,5}{3} = 66\%$$

### **% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes**

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

*Jumlah kepala desa yang pernah mendapatkan pembekalan /pelatihan + perangkat desa yg telah mengikuti pelatihan teknis + anggota BPD yg telah mendapatkan pembekalan teknis dibagi 3*

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 11,6 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 17 %. Sedangkan capaian kinerja hanya mencapai 68,24 % .Hal ini dikarenakan tahun 2023 terdapat 2 kegiatan yang mendukung kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai penopang indikator kerjanya belum terfasilitasi penganggarannya.

Dan dari 287 kepala desa baru 100 kepala desa atau sekitar 34,8% yang sudah mendapatkan pembekalan/pelatihan

Sehingga Dasar penghitungannya sebagai berikut:

$$\frac{34,8\% + 0 + 0}{3} = 11,6\%$$

Untuk selanjutnya Dinpermades akan melaksanakan koordinasi serta mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

### **Rata-rata IKM Desa**

Dari target yang telah ditetapkan sebesar 71, Dinpermades telah mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan sebesar 80,32. Sedangkan capaian kinerja mencapai 113,13 %

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

*Total IKM desa se-Kabupaten Rembang dibagi jumlah desa se Kabupaten Rembang*

### **% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif**

Capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 48,4 % dari target yang telah ditetapkan sebesar

61% atau sebesar 79,34 %.

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ lembaga sosial budaya desa aktif} + \% \text{ lembaga ekonomi desa aktif} + \% \text{ posyantekdes aktif}}{3} = \frac{99,25\% + 20\% + 26\%}{3} = 48,4\%$$

Sedangkan untuk dasar penghitungannya sebagai berikut :

➤ % lembaga sosial budaya desa aktif

Formulasi penghitungannya sebagai berikut :

**% lembaga desa aktif + % psoyandu Purnama dan mandiri + % BPSPAMS aktif + % PKK aktif dibagi 4**

$$- \% \text{ LPMD AKTIF} = \frac{287}{287} \times 100\% = 100\%$$

$$- \% \text{ Posyandu purnama dan Mandiri} = \frac{1234}{1234} \times 100\% = 100\%$$

$$- \% \text{ BPSPAMS aktif} = \frac{170}{175} \times 100\% = 97\%$$

$$- \% \text{ PKK aktif} = \frac{287}{287} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Sehingga penghitungannya sebagai berikut : } \frac{100\% + 100\% + 97\% + 100\%}{4} = 99,25\%$$

4

➤ % lembaga ekonomi desa aktif

Menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

**% Bumdes yang berkontribusi PADes + % Bumdes Klasifikasi maju + % pasar desa berkontribusi PADes dibagi 3**

$$- \% \text{ bumdes yang berkontribusi PADes} = \frac{47}{251} \times 100\% = 18,7\%$$

$$- \% \text{ Bumdes klasifikasi maju} = \frac{4}{251} \times 100\% = 1,5\%$$

$$- \% \text{ pasar desa berkontribusi PADes} = \frac{10}{25} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Sehingga didapat perhitungan} = \frac{18,7\% + 1,5\% + 40\%}{3} = 20\%$$

➤ % posyantekdes aktif

Dasar penghitungannya yaitu ;  $\frac{11}{42} \times 100\% = 26\%$

**Tabel III. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	72	70,11	97,37%
		Nilai IKM OPD	82	80,5	98.17%
	1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	85	85	100%
	2 Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	85	85	100%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	% dokumen kepegawaiyang dikelola dengan baik	85	85	100%
	4 Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	100	100%
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100	100	100%
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	85	85	100%
II	Program penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2	0	0
	1 Penyelenggaraan penataan desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2	0	0
III	Program Kerjasama Antar Desa	Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55	80	145,45%

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
	1 Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	50	60	120%
		% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	57	80	140,35%
IV	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas</b>	<b>47</b>	<b>66</b>	<b>140,43%</b>
		<b>Rata- rata IKM desa</b>	<b>71</b>	<b>80,32</b>	<b>113,13%</b>
		<b>% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahah desa</b>	<b>17</b>	<b>11,6</b>	<b>68,24%</b>
	1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung PRONANGKIS	51	71	139,22%
		% Desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	47	66	140,43%
		% Pemerintah desa dengan penatausahaan aset baik	56	20	35,71%
		% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	3,4	100	2941,18%
V	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif</b>	<b>61</b>	<b>48,4</b>	<b>79,34%</b>
	1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% lembaga ekonomi desa aktif	25	20	80%

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
		% Lembaga sosial dan budaya aktif	89,2	99,25	111,27%
		% Posyantekdes aktif	73	26	35,62%

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 16 indikator kinerja.

Dari 8 indikator kinerja program dan 16 indikator kinerja kegiatan, terdapat 5 indikator program dan 4 indikator kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan capaian IKD telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian realisasi target rata-rata mencapai 119,41% .

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

**Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2023**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
A	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa maju dan mandiri	32,8	53,6%	163,41 %	Sangat Baik	Dinpermades

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,3	1,6 %	123,08 %	Sangat Baik	Dinpermades
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	55	49	89.09 %	Baik	Dinpermades
b		Nilai Sakip OPD	72	70,11	97,37%	Baik	Dinpermades
c		IKM	82	80,5	98.17%	Baik	Dinpermades
d		% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2%	0	0	Sangat Kurang	Dinpermades
e		Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55	80	145,45%	Sangat Baik	Dinpermades
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	47	66	140,43%	Sangat Baik	Dinpermades
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	17	11,6	68,24%	Cukup	Dinpermades
h		Rata-rata IKM desa	71	80,32	113,13%	Sangat Baik	Dinpermades
i		Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	61	48,4	79,34%	Cukup	Dinpermades

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, 5 indikator kinerja Utama dapat tercapai diatas **100%** atau kategori “**Sangat Baik**”, dan 3 indikator kinerja utama dengan kategori “**Baik**” 2 indikator kinerja utama dengan kategori “**Cukup**” dan 1 indikator kinerja utama belum bisa mencapai target yang telah ditentukan, atau masuk dalam kategori “**Sangat Kurang**”

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun )

**Tabel III. 11 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	0,68 %	0,68 %	100%	30,7%	39,3%	128,01%	32,8	53,6 %	163,41 %
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	na	na	na	1,2%	1,57%	130,83%	1,3	1,6	123,08 %
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	Na	Na	Na	54	59	109,26%	55	49	89,09 %
b		Nilai Sakip OPD		66,92		70	67,17	95,96%	72	70,11	97,37%
c		IKM	Na	Na	Na	80	80,97	101,21 %	82	80,5	98,17%
d		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	Na	Na	Na	1,7%	0	0	2	0	0
e		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan	Na	Na	Na	41	57	139,024 %	55	80	145,45%

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes									
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	Na	Na	Na	46,3%	51%	110,151 %	47	66	140,43%
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	Na	Na	Na	16	0	0	17	11,6	68,24%
h		Rata-rata IKM desa	Na	Na	Na	70	0	0	71	80,32	113,13%
i		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	90	100	111,1 %	58%	47%	81,03%	61	48,4	79,34%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel III. 12 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2023**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	53,6%	34,8 %	- 18,8 %
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,6 %	1,4%	-3,2

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024	Tingkat Kemajuan
a		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	49	55,5	-6,5
b		Nilai Sakip OPD	70,11	75	4,89
c		IKM	80,5	84	3,5
d		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	2,4%	2,4
e		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	80%	68%	-12
f		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	66%	49%	-17
g		Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	11,6%	19%	7,4
h		Rata-rata IKM desa	80,32	72	-8,32
i		Persentase Lembaga Masyarakat desa aktif	48,4 %	64%	15,6

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel III. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2023**

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
-----	----------------	-------------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------------------

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	32,8 %	53,6%	163,41 %	Capaian realisasi mencapai 163,41%, karena ada peningkatan status desa Maju dan Mandiri dari tahun sebelumnya. 8 desa Status Desa maju naik menjadi desa mandiri dan 41 desa naik dari status desa berkembang menjadi status desa maju	-
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,3%	1,6	123,08 %	Total jumlah PADes se Kabupaten sebesar Rp. 6.661.944.394_ dan total jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 413.324.260.244 sehingga capaian realisasi melampaui target yaitu sebesar 123,08 %	
		Rata-rata skor kinerja pemerintah desa	55	49	89.09 %	Dari total APBDes tahun 2022 sebesar 442.425.376.156 terdapat realisasi anggaran belanja sebesar 390.571.812.104, sehingga capaian realisasi nya 89.09 %	
		Nilai Sakip OPD	72	70,11	97,37%	Komponen untuk mengukur Nilai SAKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja + pengukuran+Pelaporan Kinerja+ evaluasi internal + Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi (Hasil Review Inspektorat Kabupaten )	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		IKM	82	80,5	98.17%	Pengukuran IKM berdasarkan 9 unsur yaitu 1. Persyaratan; 2. Sistem mekanisme dan prosedur; 3. waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. kompetensi pelaksana, 7. perilaku pelaksana 8. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. sarana dan prasarana	
		% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2%	0	0	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 2, Dinpermades belum mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan atau sebesar 0%. Hal ini dikarenakan (a) Belum memadainya kapasitas Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan, (b) Belum adanya kesepahaman teknis terkait pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kel
		Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADES	55%	80	145,45%	terdapat 3 Bumdesma kawasan yang berkontribusi terhadap PADES dari 5 Bumdesma kawasan dan 5 Bumdesma lainnya sudah berkontribusi terhadap PADES	
		Persentase pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	47%	66	140,43%	Capaian realisasi telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 140,43%	-
		Persentase aparatur dan	17%	11,6	68,24%	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 17 %,	Melaksanakan koordinasi dan

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes				Realisasi sebesar 11,6% atau capaian kinerjanya hanya mencapai 68,24%. Hal ini dikarenakan tahun 2023 terdapat 2 kegiatan yang mendukung kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai penopang indikator kinerjanya belum terfasilitasi penganggarannya	mengusulkan terkait penganggaran untuk mendukung kegiatan tersebut
		Rata-rata IKM desa	71	80,32	113,13%	Dari target yang telah ditetapkan sebesar 71, Dinpermades telah mampu memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan sebesar 80,32. Sedangkan capaian kinerja mencapai 113,13 %	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa aktif	61%	48,4	79,34%	Dari 251 BUMDES di Kab. Rembang hanya 47 bumdes yang berkontribusi terhadap PADes dan 4 BUMDES yang memiliki klasifikasi maju; dan dari 25 pasar desa hanya 10 pasar desa yang berkontribusi terhadap PADes	Melakukan monitoring dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel III. 14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
I	Meningkatkan desa	32,8 %	53,6%	163,41%	-	-	-	-

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat
	berstatus maju dan mandiri							
A	Meningkatnya kemandirian desa				-	-	-	-
	1. Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,3%	1,6	123,08%	-	-	-	-
	2. Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	55	49	89,09%	-	-	-	-
	3. Nilai SAKIP OPD	72	70,11	97,37%				
	4. IKM	82	80,5	98,17%	4.040.479.259	3.887.792.853	97,38	2,62%
	5. Persentase desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	2 %	0	0	30.000.000	24.372.600	81,24	18,76%
	6. Persentase Bumdesma kawasan perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	55%	80%	145,45%	1.879.675.000	1.079.480.786	57,43	42,57%
	7. Persentase Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa berkualitas	47%	66%	140,43%				
	8. Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	17%	11,6%	68,24%	3.503.426.000	3.065.929.000	87,51	12,49%
	9. Rata-rata IKM desa	71	80,32	113,13%				
	10. Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	61%	48,4%	79,34%	541.329.000	482.693.700	89,17	10,83 %

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel III. 15 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	163,41%				Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	123,08%				Menunjang
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah desa	89.09 %				Menunjang
				I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	97,37%	Menunjang
					Nilai IKM OPD	98.17%	Menunjang
				1.Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
				2.Administrasi keuangan Perangkat daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang
				3.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				4.Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100%	Menunjang
				5.Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	% pemenuhan pelayanan penunjang perkantoran	100%	Menunjang
				6.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	% BMD dengan kondisi baik	100%	Menunjang
				II. Program penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	Tidak Menunjang
				1. Penyelenggaraan Penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	Tidak Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				III. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	145,45%	Menunjang
				1. Fasilitasi Kerjasama antar desa	% Bumdesma kawasan dengan klasifikasi berkembang	120%	Menunjang
					% Bumdesma lainnya dengan klasifikasi berkembang	140,35%	Menunjang
				IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	140,43%	Menunjang
					Rata-rata IKM desa	113,13 %	Menunjang
					% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	68,24%	Tidak Menunjang
				1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	% anggaran desa yang mendukung Pronangkis	139,22%	Menunjang
					% desa dengan pengelolaan APBDes berkualitas	140,43%	Menunjang
					% Pemerintah desa dengan	35,71%	Tidak Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					penatausahaan aset baik		
					% pemerintah desa yang telah menerapkan standart pelayanan minimal desa	2941,18%	Menunjang
				V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	79,34%	Menunjang
				1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	% lembaga ekonomi desa aktif	80%	Menunjang
					% lembaga sosial budaya aktif	111,27%	Menunjang
					% posyantekdes aktif	35,62%	Tidak Menunjang

Sumber Data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 16 indikator kinerja.

Dari 8 indikator kinerja program dan 16 indikator kinerja kegiatan, terdapat 5 indikator program dan 4 indikator kegiatan yang tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

**Tabel III. 16 Capaian Kinerja dengan Target RPJMD 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Target RPJMD	Capaian 2023 dengan RPJMD
1	Tujuan : Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	53,6%	32,8	163,41 %
2	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	% Kontribusi PADes terhadap pendapatan desa	1,6 %	1,3 %	123,08 %
		Rata-Rata skor kinerja pemerintah desa	49	55	89,09 %
3	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	70,11	72	97,37%
		Nilai IKM OPD	80,5	82	98,17%
4	Program penataan Desa	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	2%	0%
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdesma kawasan Perdesaan dan Bumdesma Lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	80%	55%	145,45%
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas	66 %	47 %	140,43%
		Rata-rata IKM desa	80,32	71	113,13%
		% aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah desa	11,6 %	17 %	68,24%
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Le mbaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	48,4 %	61 %	79,34%

Berdasarkan tabel III.16 bahwa dibandingkan dengan target RPJMD 2021-2026, capaian Dinpermades terlihat ada lima indikator yang capaiannya melebihi 100 % hal ini menunjukkan fasilitasi yang dilakukan efektif mendorong pemerintah desa untuk bergerak mencapai kemandirian. Dua indikator mencapai diatas 90% yang berarti baik. Namun tiga indikator capaian masih dibawah 90 %

dan satu indikator capaian yang masih 0 karena keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

**Tabel III. 17 Capaian Kinerja dengan Target Renstra Kementerian PDPT 2019-2024**

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Target Nasional	Perbandingan
1	Tujuan : Meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri	Presentase desa maju dan mandiri	53,6%	7,2%	744,4%
		Jumlah Desa Mandiri	22	5.444	0,40%

Capaian kinerja tahun 2023 pertumbuhan jumlah desa mandiri diatas jumlah pertumbuhan di tingkat nasional. Sedangkan jumlah tersebut berkontribusi 0,40% untuk capaian nasional yang menargetkan jumlah desa mandiri tahun 2023 sejumlah 5.444 desa dari 75.265 seluruh Indonesia.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memiliki anggaran kegiatan sebesar Rp. 9.994.909.259,- (*Sembilan Milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 9.748.259.259,- , terdiri dari :
  - b. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.925.930.000
  - c. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 6.822.329.259
2. Belanja Modal sebesar Rp. 246.650.000,-

dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.288.568.610,- (*Sembilan Milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah*) atau 98,47%. Adapun untuk capaian anggaran per program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 16 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>I</b>	<b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.040.479.259</b>	<b>3.887.792,853</b>	<b>97,38</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.750.000	7.552.200	47,95
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah	2.925.930.000	2.864.842.987	97,91
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	168.870.500	153.327.350	90,80
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	619.295.800	563.752.114	91,03
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	310.632.959	298.318.202	96,04
<b>II</b>	<b>Program penataan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.372.600</b>	<b>81,24</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	30.000.000	24.372.600	81,24
<b>III</b>	<b>Program Kerjasama Antar Desa</b>	<b>1.879.675.000</b>	<b>1.079.480.786</b>	<b>57,43</b>

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	1.879.675.000	2.196.952.115,00	98,72
<b>IV</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>3.503.426.000</b>	<b>3.065.929.000</b>	<b>98,66</b>
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	3.503.426.000	3.065.929.000	98,66
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</b>	<b>541.329.000</b>	<b>482.693.700</b>	<b>89,17</b>
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	541.329.000	482.693.700	89,17

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinpermades 2023

Anggaran Dinpermades Tahun 2023 terdiri dari 5 Program, dan 10 kegiatan dan secara keseluruhan capaian anggaran program dan kegiatan Dinpermades mencapai rata-rata 93,91 %.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Dinpermades Kabupaten Rembang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” **SANGAT BAIK** ” yaitu dengan nilai rata-rata **101,95%**,

#### **4.2 REKOMENDASI**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Rembang sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;

5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG



  
Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si  
Fembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199303 1 010